

BAB II

LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA PEMERINTAHAN SWAPRAJA SEKADAU

A. Asal Mula Kerajaan Sekadau

Nama Sekadau terambil dari jenis pohon adau yaitu sejenis kayu belian (kayu besi) yang memang banyak tumbuh di sekitar hutan Sekadau, (Saad, 2013:2). Ada beberapa versi asal mula nama Sekadau yaitu Sekado yang artinya (kumpulan beberapa desa besar) selain itu ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa kata “Sekadau” muncul dari kebiasaan masyarakat pedalaman pada zaman dahulu, jika melihat sesuatu yang asing, mereka menyebutkannya baru adau (Saad, 2013:1).

Daerah Sekadau pernah berdiri sebuah kerajaan yang terletak di Kematu tiga kilometer dari Rawak, Kecamatan Sekadau Hulu. Kerajaan ini didirikan oleh Pangeran Engkong. Pangeran Engkong memiliki tiga orang anak, anak yang pertama yaitu Pangeran Agong, anak yang kedua yaitu Pangeran Kadar dan yang ketiga yaitu Pangeran Senarong, dari ketiga putra Pangeran Engkong ini dipilih Pangeran Kadar sebagai Raja Sekadau (Saad,2013:12).

Pangeran Kadar adalah raja yang menurunkan raja-raja Sekadau selanjutnya sedangkan Pangeran Agong memilih untuk meninggalkan Kerajaan Sekadau bersama pengikutnya dan memilih untuk menetap di Lawang Kuari, Pangeran Senarong mendirikan Kerajaan Belitang dan menurunkan raja-raja Belitang (Saad,2013:12)

Masa pemerintahan Raja Pangeran Suma, pusat pemerintahan Kerajaan Sekadau berpindah dari Kematu menuju muara sungai Sekadau. Pangeran Suma pernah dikirim orangtuanya untuk memperdalam pengetahuan agama Islam ke Kerajaan Mempawah, karena itu pada masa pemerintahannya agama Islam berkembang pesat di Kerajaan Sekadau. Daerah kekuasaan dari Kerajaan Sekadau meliputi Kerajaan Belitang dan Kerajaan Lawang Kuari, daerah inilah yang kemudian hari menjadi daerah administratif Swapraja Sekadau (wawancara dengan Abang Bustami, 28 Oktober 2015).

Pangeran Suma kemudian digantikan oleh putra mahkota Abang Todong dengan gelar Sultan Anum. Kerajaan Sekadau sempat menjadi kesultanan pada masa pemerintahan Sultan Anum, kesultanan Sekadau tidak bertahan lama sampai pemerintahan Sultan Mansur kemudian digantikan dengan penembahan.

Sultan Anum kemudian digantikan lagi oleh Abang Ipong bergelar Pangeran Ratu yang bukan keturunan raja namun naik tahta karena putra mahkota berikutnya belum cukup dewasa. Setelah putra mahkota dewasa, ia pun dinobatkan memerintah dengan gelar Sultan Mansur. Kerajaan Sekadau kemudian dialihkan kepada Gusti Mekah dengan gelar Panembahan Gusti Mekah Kesuma Negara karena putra mahkota berikutnya, yakni Abang Usman, belum dewasa. Abang Usman kemudian dibawa ibunya ke Nanga Taman (wawancara dengan Abang Bustami, 28 Oktober 2015).

Sesudah pemerintahan Panembahan Gusti Mekah Kesuma Negara berakhir, Panembahan Gusti Akhmad Sri Negara dinobatkan naik tahta. Tetapi

oleh penjajah Belanda, Panembahan beserta keluarganya kemudian diasingkan ke Malang, Jawa Timur, dengan tuduhan telah menghasut para tumenggung untuk melawan Belanda dan tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Pada masa pemerintahan Gusti Ahmad Sri Negara menjadi raja oleh Belanda sering ditawarkan kontrak politik salah satunya adalah “*Akte Van Verbal Enbevestiging*” kontrak ini ditolak oleh Gusti Ahmad Sri Negara (wawancara dengan Abang Bustami, 28 Oktober 2015)

Karena peristiwa tersebut, Panembahan Haji Gusti Abdullah kemudian diangkat dengan gelar Pangeran Mangku sebagai wakil panembahan. Ia pun dipersilakan mendiami keraton. Belum lama setelah penobatannya, Pangeran Mangku wafat. Ia kemudian digantikan oleh Panembahan Gusti Akhmad, kemudian Gusti Hamid. Raja Sekadau berikutnya adalah Panembahan Gusti Kelip, (Humas Dan Protokol SEKDA Sekadau)

Swapraja Sekadau tidak dapat dilepaskan dari Kerajaan Sekadau yang telah berdiri berabad-abad sebelumnya. Meskipun secara bergantian Belanda dan Jepang menguasai daerah Sekadau, Sekadau tetap terus berkembang dan menjadi daerah yang penting bagi daerah bagian timur Kalimantan Barat.

Berada di pertemuan sungai Sekadau dan sungai Kapuas, daerah Sekadau menjadi tempat pesinggahan antara pedagang dari hulu sungai Sekadau dan dari hulu Sungai Kapuas bertemu di Sekadau. Perdagangan menjadi pokok perekonomian masyarakat Sekadau.

B. Sekadau Dimasa Kolonial

Orang-orang Italia merupakan orang Eropa pertama yang mengunjungi Kalimantan pada abad ke-14, kemudian disusul orang Spanyol, Inggris, dan Belanda. Kerajaan Sambas merupakan daerah pertama yang berada di bawah pengaruh Belanda semenjak kontrak dengan VOC (*Vereeningde Oost Indisch Compagnie*) yang dibuat oleh Ratu Sapudak (Raja Sambas) pada tanggal 1 Oktober 1609. Pada tanggal 4 September 1635, Kesultanan Banjar membuat kontrak perdagangan yang pertama dengan VOC dan VOC akan membantu Banjar menaklukkan Paser. Sejak 1636, Banjarmasin berusaha menjadi pusat mandala bagi kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur (Kalimantan Barat dalam arsip).

Hikayat Banjar mencatat adanya pengiriman upeti kepada Sultan Banjarmasin dari Sambas, Sukadana, Paser, Kutai, Berau, Karasikan (Buranun/Sulu), Sewa Agung (Sawakung), Bunyut dan negeri-negeri di Batang Lawai. Sukadana (dahulu bernama Tanjungpura) merupakan induk bagi kerajaan Tayan, Meliau, Sanggau dan Mempawah. Pada tahun 1638 di Banjarmasin terjadi tragedi pembantaian terhadap orang-orang Belanda dan Jepang sehingga Belanda mengirim ekspedisi penghukuman dan membuat ancaman terhadap Kesultanan Banjarmasin, Kerajaan Kotawaringin dan Kerajaan Sukadana. Tahun 1700 Sukadana (Matan) mengalami kekalahan dalam perang dengan Landak (Kalimantan Barat dalam arsip).

Landak dibantu Banten dan VOC, sehingga Banten mengklaim Landak dan Sukadana (sebagian besar Kalimantan barat) sebagai wilayahnya. Tahun 1756 VOC berusaha mendapatkan Lawai, Sintang, Sekadau dan Sanggau beserta daerah Kalimantan barat lainnya dari Banjarmasin.

Daerah awal di Kalimantan yang diklaim milik VOC adalah wilayah sepanjang pantai dari Sukadana sampai Mempawah yang diberikan oleh Kesultanan Banten pada 26 Maret 1778. VOC sempat mendirikan pabrik di Sukadana dan Mempawah tetapi 14 tahun kemudian ditinggalkan karena tidak produktif (Sir Stamford Raffles, *The History of Java*) (Kalimantan Barat dalam arsip)

Pendirian Kesultanan Pontianak yang didukung VOC di muara sungai Landak semula diprotes Kerajaan Landak karena merupakan berdiri di wilayahnya tetapi akhirnya mengendur karena tekanan VOC. Pada 13 Agustus 1787, Kesultanan Banjar menjadi daerah protektorat VOC dan vazal-vazal Banjarmasin diserahkan kepada VOC meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Selatan, dan pedalaman Kalimantan Barat, yang ditegaskan lagi dalam perjanjian 1826.

Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk Karesidenan Sambas dan kemudian disusul pembentukan Karesidenan Pontianak dengan diangkatnya raja-raja sebagai *regent* dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Belakangan Karesidenan Sambas dilebur ke dalam Karesidenan Pontianak beserta daerah pedalaman Kalimantan Barat menjadi Karesidenan Kalimantan

Barat. Tahun 1860 Hindia Belanda menghapuskan Kesultanan Banjar, kemudian terakhir wilayahnya menjadi bagian dari Karesidenan *Afdeeling* Selatan dan Timur Borneo (Kalimantan Barat dalam arsip)

Masa pemerintahan Pangeran Suma sebagai raja Sekadau, Belanda mulai menghancurkan kaki di Kerajaan Sekadau. Setelah Kerajaan Sekadau berhasil diduduki oleh Belanda, Kerajaan Sekadau menjadi daerah kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda dalam naungan kerajaan Belanda (saad, 2013:13)

Belanda menggabungkan Sekadau kedalam kawasan Keresidenan Borneo yang berpusat di Banjarmasin. Menurut *Staatsblad van Nederlandisch Indië* tahun 1849, 14 daerah di Kalimantan Barat termasuk dalam *wester-afdeeling* berdasarkan *Bêsluit Van Den Minister Van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie* pada 27 Agustus 1849.

Meskipun Sekadau masih berbentuk kerajaan akan tetapi dominasi Belanda akan daerah ini semakin kuat, Kerajaan Sekadau harus membayar pajak atau upeti kepada Pemerintah Hindia- Belanda. Kerajaan Sekadau harus tunduk pada Pemerintah Belanda (Wawancara dengan Abang Bustami, 28 Oktober 2015).

Belanda sering melibatkan diri dalam mengatur tata pemerintahan Kerajaan Sekadau seperti mengangkat Raja Pangeran Haji dengan gelar Gusti Muhammad Ali II Suria Negara dan Belanda melakukan pengasingan kepada Penembahan Gusti Akhamad Sri Negara ke Malang Jawa Timur, dengan

tuduhan perlawanan terhadap Belanda (wawancara dengan Abang Bustami, 28 Oktober 2015)

Dengan menguasai daerah Sekadau maka Belanda memperkuat kekuasaannya di tanah Kalimantan Barat. Pada tahun 1938 Belanda merubah Kalimantan Barat menjadi *Residentie Wester Afdeeling van Borneo*, dengan *Afdeeling Pontianak*, *afdeeling Sambas* dan *afdeeling Sintang*. Sekadau menjadi bagian *onder afdeeling* Sanggau.

Belanda beranggapan bahwa Indonesia adalah bagian dari Kerajaan Belanda, segala sumber daya yang ada adalah milik mereka (Belanda). Meskipun banyak kerajaan yang memanfaatkan kekuatan Belanda untuk memperkuat kekuasaan dan banyak juga kerajaan yang hancur karenanya.

Sebelum kedatangan Jepang di Kalimantan Barat, Kerajaan Sekadau dipimpin oleh Gusti Muhammad Kelip sebagai Raja Sekadau. Gusti Muhammad Kelip memimpin Sekadau dari tahun 1940 sampai dengan tahun 1942. Dengan kedatangan Jepang membuat Gusti Muhammad Kelip beserta raja-raja yang memimpin kerajaan di Kalimantan Barat menjadi korban pembantaian oleh Jepang di Mandor (Saad, 2013:27)

Memasuki perang dunia kedua, Belanda mendapat penyerangan dari Jerman. Perang yang terjadi di Eropa memakan banyak biaya dan membuat Belanda semakin lemah. Kelemahan Belanda dimanfaatkan oleh Jepang untuk merebut daerah jajahan Belanda. Dengan waktu yang singkat Jepang menyerang

daerah kekuasaan Belanda dan berhasil merebut daerah kekuasaan Belanda (Usman, 2009:15)

C. Sekadau Dimasa Penjajahan Jepang

Restorasi Meiji berhasil membuat Jepang menjadi negara yang ditakuti di Asia, keterlibatan Jepang dalam perang dunia kedua membuktikan bahwa kekuatan Jepang harus di perhitungkan oleh Bangsa Eropa. Dengan cita-cita *hakko ichi-u* (delapan benang di bawah satu atap), Usman (2009:16). untuk menyatukan Asia dalam kekuasaan Jepang, membuat Jepang berkeinginan untuk mengekspansi kekuasaannya sampai ke Asia Tenggara (Usman, 2009:16).

Jepang pertama kali mendarat di kota Tarakan Kalimantan Timur, pada tanggal 10 Januari 1942. Dalam waktu singkat Jepang berhasil menguasai Kota Tarakan yang merupakan daerah penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia. Kemudian Jepang berhasil menguasai daerah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat (Usman, 2009:19).

Kedatangan Jepang di Kalimantan Barat dimulai dengan menjatuhkan bom di kota Pontianak pada tanggal 19 Desember 1941 yang dikenal dengan peristiwa kapal terbang sembilan. pasukan Jepang berlabuh pertama kali di Pemangkat pada tanggal 22 Januari 1942 kemudian menduduki kota Pontianak pada tanggal 29 Januari 1942 tanpa perlawanan yang berarti dari pihak Belanda, pasukan Belanda mundur ke bagian timur Kalimantan Barat, sampai akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Belanda di Kalimantan Barat (Usman, 2009:12).

Kedatangan Jepang di Kalimantan Barat membawa perubahan dalam tata pemerintahan kerajaan-kerajaan di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat menjadi daerah administrasi Angkatan Laut Jepang (*kaigun*), pusat administrasi angkatan laut Jepang berada di Makasar Sulawesi Selatan. Sekadau yang merupakan bagian dari Kalimantan Barat menjadi daerah kekuasaan angkatan laut Jepang (Usman, 2009:24).

Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 (Tentang Aturan Pemerintah Daerah) dan Undang-Undang Nomor 28 (Tentang Aturan Pemerintah *syu* dan *tokubetsu syi*) (Poesponegoro, 2010:24).. Dalam undang-undang nomor 27 membuat perubahan disetiap daerah. Menjadikan Kalimantan Barat sebagai *minseibu syuu*. Jepang menjadikan Sekadau sebagai daerah *syu* setara dengan daerah kabupaten, *syu* Sekadau meliputi daerah kekuasaan dari Kerajaan Sekadau (wawancara dengan Syafaruddin Usman, 16 Februari 2016).

Kedatangan Jepang ke Kalimantan Barat membawa penderitaan baru bagi masyarakat. Pemerosotan perekonomian terjadi pada masa pendudukan Jepang. Masyarakat dipaksa untuk bekerja tanpa upah (*Romusha*) bekerja di pertambangan dan penebangan kayu olahan. Semua itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Jepang. Selain itu masyarakat Sekadau dan daerah lain susah untuk mendapatkan beras karena persediaan beras di ambil oleh pasukan Jepang untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang (wawancara dengan Syafarrudin Usman, 16 Februari 2016)

Keikutsertaan Jepang dalam mengatur kehidupan politik kerajaan, membuat Raja-Raja yang ada di Kalimantan Barat merencanakan perlawanan terhadap Jepang, rencana perlawanan diketahui oleh Jepang kemudian pada tahun 1942 Jepang mengumpulkan Raja-Raja dan menangkap mereka atas tuduhan perlawanan terhadap Jepang. Dalam peristiwa ini Gusti Muhammad kelip sebagai raja Sekadau beserta Raja-Raja lainnya menjadi korban pembantaian Jepang di Mandor, peristiwa ini dikenal dengan sebutan tragedi penyungkupan Jepang (wawancara dengan Syafarrudin Usman, 16 Februari 2016).

Bukan hanya para raja yang ditangkap dan dihukum mati, masyarakat Kalimantan Barat juga banyak yang menjadi korban, terutama pemuka masyarakat dan orang-orang yang dianggap berpengaruh dalam masyarakat dan dianggap mengancam kedudukan Jepang di Kalimantan Barat. Berdasarkan data dari pemerintah Kalimantan Barat ada sekitar 21.037 korban yang terdiri dari berbagai etnis dan jabatan (wawancara dengan Syafaruddin Usman, 16 Februari 2016).

Gusti Muhammad kelip diangkat menjadi raja menggantikan Gusti Abdul Hamid yang telah wafat, sebelum menjadi raja Gusti Muhammad kelip pernah menempuh pendidikan di Pontianak dan di Jawa. Sekembalinya ke Pontianak Gusti Muhammad Kelip sempat bekerja di kantor *Resident* sebagai *Ambtenaar* pada tahun 1935 dipindahkan ke daerah Sosok sampai tahun 1940 kemudian

Gusti Muhammad Kelip menjadi raja Sekadau dari tahun 1940 sampai 1944 (Saad, 2013:26)

Setelah ditangkapnya Gusti Muhammad Kelip, Kemudian Jepang mengangkat Raja-Raja yang memimpin setiap kerajaan yang ada di Kalimantan Barat, Gusti Adnan yang berasal dari Belitang diangkat menjadi Pembesar Raja Sekadau dengan Gelar Pangeran Agung. Gusti Muhammad Adnan memimpin Sekadau dari tahun 1942 sampai 1945 (Saad, 2013:19).

Pengangkatan raja yang baru oleh Jepang bukan hanya di kerajaan Sekadau saja tetapi juga di kerajaan-kerajaan yang lain yang mana raja sebelumnya telah dibunuh oleh Jepang. Dengan mengangkat raja yang baru akan mempermudah Jepang menguasai kerajaan tersebut (wawancara dengan Syafaruddin Usman, 16 Februari 2016).

D. Masa Kedudukan NICA

Kekalahan Jerman dan Italia di benua Eropa dalam perang dunia ke dua menjadikan Jepang sebagai satu satunya yang masih bertahan dari serangan sekutu. Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang mengakibatkan Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia Kedua. Kekalahan Jepang diakibatkan pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat dalam perang pasifik yang menewaskan banyak tentara dan warga sipil Jepang yang ada di kota tersebut (Poeponogoro, 2010:137).

Kekalahan Jepang dalam perang dunia kedua membuat Jepang harus menyerah tanpa syarat kepada Sekutu dan meninggalkan daerah yang dikuasainya, termasuk Kalimantan Barat sebagai salah satu daerah kekuasaan Jepang. Pasukan Australia yang tergabung dalam pasukan sekutu datang ke Kalimantan Barat dengan membawa pasukan NICA (*Netherland Indies Civil Administration*) mendarat di Kalimantan Barat yang bertujuan untuk melucuti tentara Jepang dan kembali menduduki Kalimantan Barat (wawancara dengan Syafaruddin Usman, 16 Februari 2016).

Setelah Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu, maka raja-raja yang diangkat oleh Jepang diganti dengan raja-raja yang baru. Raja Sekadau yang dipegang oleh Gusti Muhammad Adnan digantikan oleh Gusti Muhammad kolen sebagai raja Sekadau yang baru (wawancara dengan Abang Bustami, 28 Oktober 2015).

Pasukan NICA (*Netherland Indies Civil Administration*) bersama Dr. H.J Van Mook sebagai Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda menyatakan akan memberikan kemerdekaan kepada rakyat Kalimantan Barat sebagai persemakmuran dari Belanda. Pernyataan tersebut membuat masyarakat Kalimantan Barat terpecah menjadi dua kubu, sebagian masyarakat menginginkan Kalimantan Barat bergabung dengan Republik Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sebagian lagi menginginkan merdeka dengan persemakmuran Belanda (Andi, 2010:25).

Pasca kekalahan Jepang di Kalimantan Barat, masyarakat Sekadau dan daerah lain merasa kebingungan karena uang Jepang yang terlanjur banyak beredar di masyarakat tidak berlaku lagi. Pada saat itu beredar tiga mata uang yaitu Oeang Republik Indonesia, uang Jepang dan uang Belanda (Poeponegoro, 2010:273)

Setelah mengambil alih Kalimantan dari tangan Jepang, NICA (*Netherland Indies Civil Administration*) mendesak kaum Federal Kalimantan untuk segera mendirikan Negara Kalimantan menyusul Negara Indonesia Timur yang telah berdiri. Maka dibentuklah Dewan Kalimantan Barat tanggal 28 Oktober 1946, yang kemudian menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Barat pada tanggal 27 Mei 1947; dengan Kepala Daerah, Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak dengan pangkat Mayor Jenderal. Wilayahnya terdiri atas 13 kerajaan sebagai swapraja seperti pada zaman Hindia Belanda yaitu Sambas, Pontianak, Mempawah, Landak, Kubu, Tayan, Meliau, Sekadau, Sintang, Selimbau, Simpang, Sukadana dan Matan (Dimiyati,2013:32)

Pada tahun 1946 kerajaan yang ada di Kalimantan Barat mengadakan pertemuan. Hasil dari pertemuan ini mengeluarkan 12 Swapraja Dan 3 Neo Swapraja mengabungkan diri membentuk Dewan Kalimantan Barat dan kemudian membentuk sebuah ikatan yaitu Daerah Istimewa Kalimantan Barat pada tahun 1948, daerah istimewa Kalimantan barat meliputi dua belas swapraja dan tiga neo swapraja. Swapraja Sekadau menjadi bagian dari Daerah Istimewa Kalimantan Barat (wawancara dengan Syafarrudin Usman, 16 Februari 2016)

Berdasarkan Putusan Gabungan Kerajaan-Kerajaan Bernebo Barat tanggal 22 Oktober 1946 No 20 L, Daerah Istimewa Kalimantan Barat terdiri dari 12 Swapraja dan 3 Neo- Swapraja, yakni Swapraja Sambas, Swapraja Pontianak, Swapraja Mempawah, Swapraja Landak, Swapraja Kubu, Swapraja Matan, Swapraja Sukadana, Swapraja Simpang, Swapraja Sanggau, Swapraja Sekadau, Swapraja Tayan, Swapraja Sintang dan Neo Swapraja, yaitu Neo Swapraja Meliau, Neo Swapraja Nanga Pinoh, Neo Swapraja Kapuas Hulu. Mendapat pengesahan dari Belanda pada tahun 1948 (Dimiyati,2013:32)

Swapraja-swapraja di Kalimantan Barat di pimpin oleh para Sultan atau raja- raja, kepala swapraja Sekadau yaitu Gusti Muhammad Kolen. Gusti Muhammad Kolen mengepalai Swapraja Sekadau dari tahun 1946 sampai tahun 1952. Berakhirnya Swapraja Sekadau ditandai dengan penyerahan kekuasaan Swapraja Sekadau kepada pemerintahan Republik Indonesia (Saad, 2013:21).

Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta mengirim Dr. Murdjani ke Kalimantan untuk mengurus penyatuan daerah Kalimantan kedalam Republik Indonesia. Daerah Kalimantan yang pertama kali mengabungkan diri dengan Republik Indonesia adalah Kalimantan Timur dengan ditandai dengan dibubarkannya Dewan Kalimantan Timur kemudian disusul Kalimantan Selatan dengan ditandai dibubarkannya Dewan Banjar, pada tanggal 22 April 1950 kalimantan Barat juga bergabung dengan Pemerintah Republik Indonesia (Poesponogoro, 2010:306).